

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BERBASIS KEBERLANJUTAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU**

**Hazmi Arief\* dan Ulfa Rizki Pradini\*\***

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to analyze the policy of sustainability-based development in Meranti Islands Regency by looking at the real conditions of coastal resources which consist of ecological, economic, social and technological dimensions. Indicators of sustainable development will not be separated from economic, ecological / environmental, social, political and cultural aspects. The method used in this study was the survey method. The population in this study were coastal communities in the Meranti Islands. To obtain and analyze the policy of sustainable development in the coastal area of Meranti Islands, it was analyzed using the Analysis Hierarchy Process (AHP) method. The arrangement of AHP's hierarchy of decision making with actors is the Regional Government, Fisheries and Marine Services, Bappeda, Environmental Agency, Food Security Agency, Plantation Service, Food Crop Agriculture Service and Social Welfare Service. The results of policy analysis through AHP, that the priority sectors that need to be developed in the context of sustainable development in the coastal areas of the Meranti Islands Regency are fisheries and plantation sectors with a score of 0.632. The existing characteristics and conditions of coastal communities in Meranti Islands Regency are farmers, farmers and fishermen communities, fishing communities and urban / industrial communities.

**Keywords: Policy, Sustainability, Coastal Society**

---

\* **Hazmi Arief** adalah Staf Pengajar Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau

\*\* **Ulfa Rizki Pradini** adalah mahasiswa Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Riau

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau serta garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km<sup>2</sup>. Kawasan pesisir pantai Indonesia yang memiliki kekayaan sangat besar tersebut harus dijaga kelestariannya dengan melakukan pemanfaatan fungsi wilayah secara terencana, serasi, seimbang dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam penataan suatu wilayah seperti desa atau daerah secara optimal dibutuhkan dukungan strategi kebijakan pemerintah yang bersifat nasional maupun lokal agar mekanisme pasar tidak menimbulkan dampak yang merugikan lingkungan dan masyarakat miskin. Kebijakan tersebut meliputi upaya pengembangan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan kondisi infrastruktur, potensi kawasan dan daya dukung lain. Di samping konsep pengembangan wilayah melalui penataan ruang, kebijakan sektoral sangat berperan mencapai sasaran pembangunan. Kebijakan yang tidak tepat akan menghilangkan arti dari suatu perencanaan wilayah. Hal ini terjadi pada penerapan perencanaan pembangunan yang kurang tepat sehingga terjadi kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lain.

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia tidak saja ditentukan oleh kemampuan intelektualnya tetapi juga oleh beberapa kondisi lainnya seperti : Ketersediaan Sumber daya alam yang ada di sekitarnya seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

Secara garis besar Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi. Sumberdaya alam tersebut dapat berasal dari sumberdaya hutan, sumberdaya mineral, sumberdaya pertanian, sumberdaya perikanan, sumberdaya peternakan dan lainnya. Kekayaan sumberdaya alam di Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut juga didukung oleh potensi kawasan yang sangat strategis.

Pembangunan di semua bidang pada Kabupaten Kepulauan Meranti dewasa ini telah menunjukkan perkembangan yang berarti, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Permasalahan tersebut di antaranya adalah pengembangan dari beberapa bidang yang belum terkonsentrasi pada daerah atau lokasi dengan potensi yang mendukung keberlanjutan untuk dikembangkan. Fokus pengembangan pembangunan berkelanjutan belum ditempatkan pada kawasan-kawasan sentra produksi yang potensial, sehingga usaha yang dilakukan tersebut belum terencana dengan baik. Kondisi ini dapat menjadi penghambat bagi perkembangan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perbedaan yang

sangat mencolok antara desa-desa yang ada di wilayah daratan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan desa-desa yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga perlunya suatu konsep pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengembangan berbasis keberlanjutan di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan melihat kondisi riil sumberdaya pesisir yang terdiri atas dimensi ekologi, ekonomi, sosial dan teknologi.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Metode survey dilakukan dengan cara peninjauan, pengamatan serta pengambilan data dan informasi secara langsung di lapangan dengan menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga masyarakat pesisir secara esensial dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir, dan riset dokumen. Survei dilakukan terhadap rumah tangga masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Prosedur dan mekanisme penelitian meliputi tahapan persiapan, penyusunan proposal, penyusunan Kuesioner, pengumpulan data di lapangan, pengolahan dan analisis data, dan penyusunan laporan.

### **2.1.Sumber Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang akan dikumpulkan meliputi data primer maupun sekunder. Data primer dikumpulkan melalui survei yang akan difokuskan pada empat tipe dimensi yang meliputi:

1. Dimensi Sumberdaya dan Lingkungan (Ekologi)
2. Dimensi Ekonomi
3. Dimensi Kelembagaan, Sosial dan Budaya
4. Dimensi Teknologi.

### **2.2. Analisis Data**

Untuk memperoleh dan menganalisis kebijakan pengembangan berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dianalisis secara deskriptif kualitatif dan didukung dengan data-data kuantitatif. Data dan informasi yang dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan kajian, analisis sebagai berikut:

#### **Analisis Proses Berjenjang/ *Analysis Hierarchy Process (AHP)***

Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu hierarki.

Prinsip dasar penyelesaian persoalan dengan metode AHP adalah *decomposition, comparative judgement, synthesis of priority, dan logical consistency*. Pada analisis ini, kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan. Menurut Saaty (1983), untuk berbagai persoalan skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Kemudian menurut Marimin (2004), untuk memeriksa apakah perbandingan berpasangan telah dilakukan dengan konsekuen digunakan parameter *Consistency Ratio (CR)*.

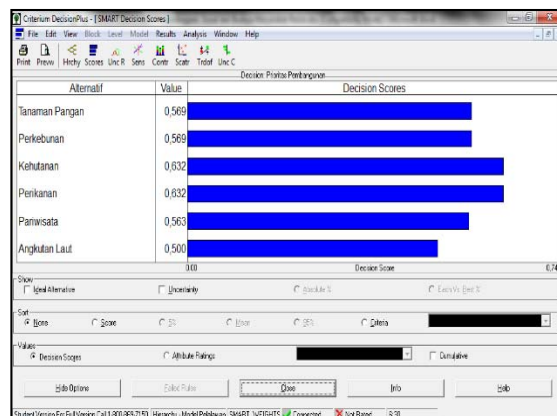
*Analysis Hierarchy process (AHP)* dalam penelitian ini dilakukan untuk menentukan prioritas pengembangan sektor prioritas pada bidang kelautan serta prioritas kebijakan pengembangan sumberdaya perikanan dalam rangka menghasilkan rumusan arahan kebijakan pengembangan perikanan tangkap di Kepulauan Meranti.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Sektor Prioritas Pesisir Kepulauan Meranti

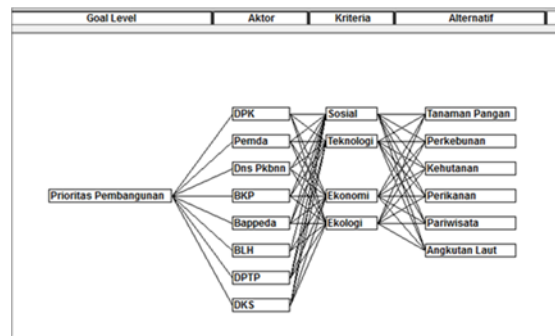
Berdasarkan data kontribusi antar sektor di Kabupaten Kepulauan Meranti serta analisis data primer dan sekunder, maka terdapat lima sub sektor yaitu; tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan perikanan.

Penyusunan hierarki pengambilan keputusan AHP dengan aktor adalah Pemda, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Kesejahteraan Sosial. Sedangkan kriteria yaitu ekonomi, ekologi, teknologi dan sosial. Bentuk hierarki ditampilkan dalam Gambar 1 dan hasil analisis pada Gambar 2.



Gambar 1. Diagram Hierarki Proses Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Kepulauan Meranti

Melalui *Analytical Hierarchy Process* (AHP) diperoleh prioritas pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1. Hasil analisis ini berdasarkan data primer melalui wawancara mendalam dan kuesioner dengan pakar. Pemilihan aktor dalam penyusunan hierarki analisis kebijakan melalui teknik pengambilan keputusan AHP ini adalah berdasarkan tahapan analisis *stakeholder*.



Gambar 2. Hasil Penilaian AHP Prioritas Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Kepulauan Meranti

Berdasarkan hasil analisis pada Gambar 2, sektor prioritas yang perlu dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

## 2. Kebijakan Rancangan Program

### 2.1. Konsep Program Sumberdaya Alam Berbasis Pembangunan Ekonomi Wilayah Pesisir

Pembangunan ekonomi wilayah pesisir saat ini didominasi oleh kegiatan pertanian yang telah dimanfaatkan secara maksimal, namun di sisi lain pemanfaatan sumberdaya di sektor perikanan yang memiliki potensi yang besar masih sangat minim. Maka dalam perencanaan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini hendaknya diarahkan ke sektor perikanan dengan memperhatikan *sustainability* atau keberlanjutan dari lingkungan itu sendiri.

#### 2.1.1. Perikanan Tangkap

Kegiatan penangkapan perikanan merupakan prioritas utama kebijakan pembangunan wilayah pesisir untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang harus dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kebijakan yang harus dikeluarkan berdasarkan kondisi eksisting adalah kebutuhan akan sarana dan prasarana tangkap, hal ini perlu dilakukan dikarenakan masih minimnya alat tangkap nelayan untuk mendapatkan ikan yang ekonomis tinggi dan armada tangkapan yang digunakan masih sangat

tidak memadai (tanpa motor) sehingga tidak mampu menjangkau daerah laut yang jauh.

Saat ini hasil tangkapan yang diperoleh oleh nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan ikan yang memiliki ekonomis yang masih rendah sehingga dalam penjualan hasilnya memerlukan perlakuan terlebih dahulu (*added value*). Hasil penangkapan nelayan masih sangat minim dimana dalam satu hari dengan dua trip, nelayan rata-rata hanya mendapatkan ikan sebanyak 50 kg. Dengan harga per kg ikannya hanya sebesar Rp. 20.000/kg sedangkan hasil tangkapan udang sebanyak 10 kg dan harga jual segar sebesar Rp. 25.000/kg.

### **2.1.2. Perikanan Budidaya**

Saat ini ada tiga jenis budidaya perikanan yang dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu budidaya tambak, budidaya kolam dan budidaya karamba.

Usaha budidaya perikanan di kolam saat ini telah cukup dikembangkan, rata-rata pembudidaya kolam mengembangkan usaha budidaya ikan Patin. Namun demikian sampai saat ini usaha budidaya tersebut masih dilakukan secara tradisional, sehingga dalam pengembangannya dibutuhkan usaha intensifikasi untuk dapat meningkatkan produksi kolam tersebut. Keterbatasan ketersediaan pakan terdekat dari tempat budidaya kolam membatasi masyarakat pembudidaya kolam untuk mengembangkan usahanya.

### **2.1.3 Kelembagaan Permodalan dan Pasar**

Tahapan perencanaan pengembangan lembaga permodalan dan pasar lebih diarahkan pada :

- a. Mengoptimalkan lembaga-lembaga pendukung yang telah ada seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Tempat Pelabuhan Perikanan.
- b. Perlunya pengembangan Lembaga Keuangan Mikro untuk dapat menunjang kebutuhan permodalan para nelayan di kawasan pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

## **2.2. Konsep Program Sumberdaya Manusia Berbasis Penguatan Teknologi Wilayah Pesisir**

Hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggambarkan bahwa wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki kekayaan sumberdaya alam yang potensial, khususnya untuk usaha perikanan, perkebunan dan pariwisata bahari di beberapa tempat. Berdasarkan hal tersebut, bidang perikanan merupakan salah satu bidang andalan yang dapat dijadikan motor (*engine of growth*) dalam pengembangan ekonomi wilayah pesisir. Kegiatan perikanan tersebut meliputi budaya *silvifisheries*, pengembangan teknologi

penangkapan dan penanganan hasil perikanan. Selain itu, perlu didukung oleh tersedianya tempat pelelangan dan kelembagaan permodalan.

Berdasarkan gambaran tersebut maka strategi pembangunan ekonomi wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti melalui teknologi dan pengembangan SDM adalah : **strategi pertama** dalam tahap awal pengembangan adalah bidang budidaya *silvifisheries*, karena kondisi sumberdaya hutan bakau di kawasan ini belum dimanfaatkan secara efisien dan optimal. Dalam kegiatan ini diperlukan teknologi yang digunakan dan pengelolaan lingkungan kawasan yang terkontrol dan teratur. Penerapan teknologi tambak ramah lingkungan pada sistem pertambakan tradisional plus merupakan alternatif yang paling cocok dalam pengembangan tambak *silvifisheries* di kawasan wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, sebagai prioritas andalan sebagai **strategi kedua** dalam pembangunan ekonomi wilayah pesisir berupa kegiatan pengembangan teknologi penangkapan. Usaha perikanan tangkap merupakan kegiatan penting untuk diperhatikan, kegiatan ini lebih diarahkan pada penguatan teknologi alat tangkap ikan yang mendukung penangkapan ikan nelayan pada perairan nasional atau teritorial 1, 2, dan 3. Untuk itu, kegiatan pengembangan teknologi alat tangkap ikan ini perlu disosialisasikan kepada nelayan.

### **2.2.1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia**

Kegiatan dalam mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini meliputi kegiatan pelatihan, pendidikan, pembinaan dan pendamping. Kegiatan ini diharapkan dapat membekali masyarakat tentang bagaimana melakukan suatu usaha yang profesional, bagaimana menggunakan peralatan tangkap, bagaimana melakukan kegiatan budidaya yang ramah lingkungan, bagaimana melakukan kegiatan penanganan hasil perikanan, bagaimana mengembangkan tempat mengelola unit usaha agar dapat berkembang dengan baik dan menjadi unit usaha yang handal di kawasan tersebut sehingga dapat memicu bagi penyerapan tenaga pelelangan, bagaimana memasarkan hasil yang diperoleh dan bagaimana kerja dan pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir.

Rancangan program untuk merespon teknologi secara terapan dalam mengembangkan wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah mengembangkan teknologi ramah lingkungan untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan-lahan yang marjinal yang tidak produktif, tanah-tanah berawa, memanfaatkan lahan yang telah ada dan mengembangkan teknologi hasil guna terhadap peralatan tangkap perikanan dan sarana budidaya perikanan.

Dalam merespon rancangan program teknologi akan ditentukan oleh rancangan program peningkatan kualitas sumberdaya manusia difokuskan kepada orientasi dan

pemahaman wawasan *entrepreneurship* agar memahami aspek ekonomi, sosial, ekologi, teknologi dan kelembagaan sebagai aspek pertimbangan perancangan program melalui kegiatan-

kegiatan, yaitu; (i) pelatihan, (ii) pendidikan, (iii) pembinaan dan (iv) pendampingan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan paradigma baru pelayanan birokrasi yang responsif dan fleksibel.

### **2.2.2. Konsep Program Penguatan Sarana dan Prasarana**

Konsep program penguatan prasarana dan sarana dalam mengembangkan wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah meningkatkan sarana peralatan tangkap dengan revitalisasi sarana kapal tangkap dan perlengkapannya dan mengupayakan ketersediaan bibit unggul dan pakannya serta meningkatkan kualitas pengelolaan pasca panen. Meningkatkan prasarana pengelolaan pengembangan wilayah berupa melakukan perbaikan infrastruktur listrik, sarana air bersih dan sanitasi lingkungan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kawasan. Sarana transportasi dan industri perikanan perlu ditinjau ulang dengan inovasi disinsentif dan insentif kepada pihak investor dalam upaya meningkatkan pemasaran dan kualitas hasil produk perikanan.

## **2.3. Rancangan Program Sumberdaya Manusia Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

### **2.3.1. Partisipasi Masyarakat**

Rancangan program yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah mengupayakan partisipasi aktif masyarakat sebagai konsep keputusan *bottom up* berlandaskan pendekatan kearifan lokal yang dapat diterima rancangannya oleh masyarakat untuk menjadi *grand design* dalam konsep keputusan top down bagi pemerintah kabupaten.

Partisipasi yang dimaksud adalah sebagai bentuk *campagne event* dalam perancangan yang demokratis dan otonom dalam menentukan arah kebijakan pengembangan wilayah pesisir yang dikerucutkan dari kerangka perencanaan berwawasan publik (*public participation*).

### **2.3.2. Peningkatan Kelembagaan**

Rancangan program peningkatan fungsi kelembagaan dalam mendukung pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah mengupayakan pemberdayaan lembaga keuangan mikro dengan mengembangkan koperasi yang sudah ada,



yaitu Koperasi Sinar Bahari Kecamatan Ransang Pesisir dan Lembaga Perkreditan Masyarakat untuk bersinergi melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak pemerintah kabupaten melalui pengembangan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah ada (PT. Bumi Meranti) dan pihak perbankan guna meningkatkan modal usaha dalam pengembangan pengelolaan perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka diperoleh beberapa informasi penting tentang kondisi dan potensi sumberdaya alam yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Karakteristik dan kondisi eksisting masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu masyarakat petani, masyarakat petani dan nelayan, masyarakat nelayan dan masyarakat perkotaan/ industri. Berdasarkan kondisi lingkungan terdapat tipologi usaha masyarakat pesisir yaitu dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, Masyarakat pesisir Kepulauan Meranti memiliki usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pariwisata dan angkutan laut.
2. Aspek lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi pada sektor perkebunan ditambah adanya potensi perikanan. Sehingga arahan kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir adalah berdasarkan pertimbangan potensi dan kondisi eksisting wilayah.
3. Hasil analisis kebijakan melalui AHP, diperoleh kesimpulan bahwa sektor prioritas yang perlu dikembangkan dalam rangka pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sektor perikanan dan perkebunan dengan skor 0,632.

##### **4.2. Saran**

1. Meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi bagi wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan upaya partisipasi aktif masyarakat sebagai konsep keputusan *bottom up* berlandaskan pendekatan kearifan lokal yang dapat diterima rancangannya oleh masyarakat itu sendiri untuk menjadi *grand design* dalam konsep keputusan *top down* bagi pemerintah kabupaten.
2. Tanggap teknologi secara terapan dalam mengembangkan teknologi ramah lingkungan untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan-lahan yang marjinal atau tidak produktif seperti; tanah-tanah berawa, memanfaatkan lahan yang telah ada dan

mengembangkan teknologi hasil guna terhadap peralatan tangkap perikanan dan sarana budidaya perikanan. Teknologi akan ditentukan oleh rancangan program peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang difokuskan kepada orientasi dan pemahaman wawasan *enterpreneurship* agar memahami aspek ekonomi, sosial, ekologi dan kelembagaan secara mandiri.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana peralatan tangkap dengan revitalisasi sarana armada dan alat tangkap, mengupayakan ketersediaan bibit unggul ikan budidaya dan pakannya serta meningkatkan kualitas pengelolaan pascapanen. Prasarana pengelolaan pengembangan wilayah berupa perbaikan infrastruktur listrik, sarana air bersih, sanitasi lingkungan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi kawasan yang didukung transportasi dan industri perikanan perlu ditinjau ulang dengan inovasi berupa disinsentif dan insentif kepada pihak investor dalam upaya meningkatkan pemasaran dan kualitas hasil produk perikanan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Jaya, A., 2004, Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), Program Pasca Sarjana IPB, Bogor.
- Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk.
- Munasinghe, M., 1993, *Environmental Economics and Sustainable Development*. World Bank Environment Paper Number 3. The World Bank. Washington D.C.
- Saaty, T.L. 1983. *Decision Making For Leaders: The Analytical Hierarchy Process for Decision in Complex World*. RWS Publication, Pittsburgh.